

**Sanksi Pelanggaran
Pasal 72 Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANTOLOGI STUDI AGAMA

Djam'annuri ♦ Siswanto Masruri ♦ Sekar Ayu Aryani
A Singgih Basuki ♦ M. Rifa'i Abduh ♦ Rahmat Fajri
Ustadi Hamsah ♦ Ahmad Muttaqin ♦ Khairullah Zikri
Roma Ulinnuha ♦ Dian Nur Anna
Ahmad Salehudin ♦ Roni Ismail

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012

ANTOLOGI STUDI AGAMA

Penulis:

Djam'annuri, Siswanto Masruri, Sekar Ayu Aryani, A Singgih Basuki
M. Rifa'i Abduh, Rahmat Fajri, Ustad Hamsah, Ahmad Muttaqin
Khairullah Zikri, Roma Ulinuha, Dian Nur Anna
Ahmad Salehudin, Roni Ismail

Editor Ahli:

Rahmat Fajri & Khairullah Zikri

Editor Pelaksana:

Roni Ismail

Tata Letak: Siti Rokhmah

Desain Cover: CMG

Cetakan Pertama, November 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ISBN: 978-979-3494-56-2

979-3494-56-5

Diterbitkan oleh:

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA

Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012

Bekerjasama dengan

Penerbit Belukar

Jalan Wahid Hasyim Gg. Menur No. 75

Condong Catur, Sleman, Yogyakarta

Telp./faks.: [0274] 487032

PENGANTAR EDITOR

Agama: Rahmat atau Sebaliknya?

Apakah agama benar-benar telah menjadi sumber rahmat bagi terciptanya perdamaian dalam kehidupan umat manusia sebagaimana diyakini oleh para pemeluknya? Atau sebaliknya, agama justru sebagai pemicu kekerasan yang seringkali menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerugian sebagaimana sejarah sering membuktikannya?

Diskusi tentang agama selalu menjadi fokus bersama, tidak mengenal ruang dan waktu, kapan pun dan di manapun. Hal itu terjadi karena agama, dengan berbagai cara telah dilakukan untuk meninggalkannya atau minimal menjadikannya wilayah privat, namun ia tidak pernah terpisah atau lepas secara penuh dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik umat manusia. Hal itu mudah dipahami karena manusia secara bersamaan adalah makhluk religius, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya.

Oleh karenanya kedua pertanyaan bipolar di atas penting untuk dianalisis secara jernih dan dibicarakan tanpa apologi apapun. Bukan saja karena memang pada kenyataannya agama seringkali menjadi faktor destruktif dalam kehidupan manusia, namun juga karena kita meyakini bahwa agama adalah ideal dan baik. Sehingga perlu dipetakan semacam distingsi antara agama ideal –atau agama damai (*peace religion*) dalam tema antologi ini, dengan agama yang telah “dipolitisasi” oleh para pemeluknya, bahkan oleh para pemuka/figur/tokoh agama sendiri –para elit keagamaan. Di sini agama kemudian menjadi identitas diri dan kelompok. Orang atau kelompok tadi kemudian menganggap dirinya paling benar – minimal lebih benar – dalam memahami dan

menjalankan agama dan siap melakukan bahkan pengorbanan harta dan nyawa untuk mempertahankan identitas dalam bentuk pemahaman tadi yang telah diyakini sedemikian rupa sebagai "agama".

Dalam konteks demikian agama seringkali menampilkan dirinya secara kontraproduktif dengan fungsi dan misi yang inheren pada awalnya. Agama kemudian dipahami dan difraksiskan sebagai sebuah struktur nilai yang mengekang dan eksklusif, dan mendidik umatnya untuk saling membenci dan menjaga jarak dengan umat lain termasuk beda paham dalam satu agama yang sama. Hal ini jelas-jelas kontravisioner dengan misi kehadiran agama itu sendiri.

Selain sebagai identitas diri dan kelompok, agama juga memiliki fungsi sosial yang lebih eksplisit dan praktis, yaitu penguat kekuatan sosial. Berangkat dari fakta ini, agama harus mengandung nilai-nilai universal yang bisa manifest sepanjang sejarah peradaban manusia seperti keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, toleransi, kebebasan, dan lain-lain.

Agama juga pada kenyataannya mengandung potensi konflik yang secara teologis ada di dalam kitab sucinya, yaitu ketika ia hanya dipahami secara monolitik dan literal. Ayat-ayat tentang perintah perang dan berjihad misalnya sangat terkait dengan keadaan lokus dan tempus di mana ia diturunkan, jadi ia tidaklah berlaku bagi semua konteks ruang dan waktu tadi. Juga, keduanya ditempuh sebagai keadaan terpaksa dan pilihan paling akhir yang justru dipilih untuk mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan bukan untuk melawan dan menghancurkan mereka yang berbeda agama dari diri sendiri atau berbeda paham keagamaan. Di sinilah pentingnya untuk memahami teks-teks agama dalam kerangka kemanusiaan dan persaudaraan ketika ditemukan satu dua butir ayat yang sensitif seperti itu. Konflik yang terjadi akibat teks-teks seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi selama pemahaman atau penafsiran terhadapnya dibarengi wawasan kemanusiaan, keadilan, kemajemukan, dan persaudaraan universal.

Sebagai pembuktian atas kebenaran dirinya sebagai penebar kedamaian yang membawa kedamaian, persaudaraan, dan kemanusiaan, agama jelas harus menunjukkan kapasitasnya untuk

bergandeng seiring dengan perkembangan zaman manusia, mampu memberikan solusi bagi persoalan kehidupan mereka, dan bisa menjauhkan para pemeluknya dari aksi-aksi yang jelas-jelas bertentangan dengan misi yang dibawanya, seperti radikalisme, terorisme, dan segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selain itu, agama sebagai sebuah sistem nilai jelas mengandung kemutlakan dari sisi normativitasnya, akan tetapi dalam konteks menempatkan agama secara produktif pada setiap denyut perubahan masyarakat yang terjadi, maka agama tidak bisa dilaborasi melalui sebuah tafsir monolitik untuk selamanya. Sebab, setiap tafsir atau pemahaman memiliki keterkaitan dengan konteks aktual di mana tafsir itu ditelorkan, sehingga sebuah tafsir atau pemahaman yang monolitik tadi saja tidak akan bisa menjawab perubahan dan kebutuhan manusia yang real di dalam setiap generasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada satu orang atau kelompok pun yang berhak mengklaim diri sebagai pemegang kewenangan tunggal dalam menafsirkan teks-teks agama/kitab suci dan penyeragamannya adalah pengerdilan atas teks itu sendiri di samping tentunya pengerdilan terhadap kreativitas keberagaman pemeluknya. Oleh karena itu, penerjemahan agama yang dialektis – dialog antara teks yang normatif dengan konteks yang historis – merupakan keniscayaan agar komitmen ideal yang diusung yang diusung agama mampu menjadi kekuatan kedamaian untuk mewujudkan tata dunia yang santun, toleran, dan majemuk dalam setiap alur perubahan yang terjadi.

Kembali ke pertanyaan awal tulisan ini, Apakah agama benar-benar telah menjadi sumber kedamaian bagi terciptanya perdamaian dalam kehidupan umat manusia, atau ia justru (akan selalu) menjadi pemicu kekerasan yang seringkali menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerugian yang tak terhingga? Yang berhak menjawab dan membuktikannya pertanyaan mendasar ini adalah para pemeluknya, apakah akan menjadikannya sebagai kekuatan kedamaian yang akan membawa segala kebaikan bagi umat manusia atau malah sebaliknya menjadi "laknat" bagi mereka. Kumpulan tulisan dalam Antologi Studi Agama ini merupakan salah satu upaya akademik untuk mendudukkan kembali agama pada

konteks yang pertama, yakni dalam kapasitasnya sebagai *moral force* untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Tulisan-tulisan yang ada dalam Antologi ini ditulis oleh para dosen Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga yang memang memiliki konsern dalam mengembangkan keberagaman yang toleran dan terbuka yang sudah sekian lama melakukan *peace-building* melalui pembelajaran/pendidikan dan penelitian-penelitian.

Karya ini dipersembahkan bagi kemanusiaan secara universal, dan semoga bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka yang lebih baik. Impian kita bersama, umat beragama yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing.

Yogyakarta, 6 Desember 2012

Editor

DAFTAR ISI

1. HUBUNGAN KRISTEN-ISLAM Oleh Djam'annuri	1
2. PERJUANGAN TANPA KEKERASAN DAN KERJA SAMA ANTARAGAMA Oleh Siswanto Masruri	23
3. RELIGIOUS FREEDOM IN THE SOCIETY: A STUDY ON CONVERSION AND ITS CONSEQUENCE IN CONTEMPORARY MUSLIM THINKER Oleh A Singgih Basuki	37
4. PENDIDIKAN AGAMA JANGAN MENAKUT-NAKUTI Oleh Sekar Ayu Aryani	57
5. TEXTUAL AND CONTEXTUAL INTERPRETATIONS TOWARDS RELIGIOUS HARMONY IN INDONESIA Oleh M. Rifa'i Abduh	75
6. REDEFINING RELIGION: INDONESIAN INDIGENOUS RELIGIONS <i>VIS A VIS</i> STATE HEGEMONY (THE CASE OF THE KAHARINGAN-LOKSADO DAYAK, SOUTH BORNEO) Oleh Ahmad Muttaqin	93
7. <i>LOVE, SINCERITY</i> DAN <i>BROTHERHOOD</i> : ETIKA RELASI ANTAR AGAMA DALAM ISLAM UNTUK MENCIPTAKAN PERDAMAIAN MENURUT SAID NURSI Oleh: Ustadi Hamsah	111
8. <i>JIZYAH</i> (PAJAK KEPALA BAGI NON-MUSLIM) DAN <i>'USYÛR</i> (TARIF BEA CUKAI)) DALAM MASYARAKAT MUSLIM Oleh Rahmat Fajri	141

9. 19 th CENTURY JAVANESE ANTI-ISLAMIC SENTIMENT: THE SERAT DERMAGANDHUL AND SULUK GATOLOCO REPRESENTATION OF ISLAM	
Oleh: Khairullah Zikri	156
10. OCCIDENTALISM IN POST-MODERNISM FRAMEWORK: A JEAN-FRANCOIS LYOTARD'S PERSPECTIVE	
Oleh Roma Ulinuha	171
11. PERAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA	
Oleh: Dian Nur Anna	183
12. MEMAHAMI KEKERASAN AGAMA YANG TERULANG: ANALISIS DOKTRIN, STRUKTUR DAN KULTUR	
Oleh Ahmad Salehudin	214
13. MENGGAGAS SEBUAH <i>PEACE THEOLOGY</i> (PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN)	
Oleh Roni Ismail	233

PERJUANGAN TANPA KEKERASAN DAN KERJA SAMA ANTAR AGAMA

Oleh: Siswanto Masruri

Berbagai konflik dan kekerasan di kawasan **Timur Tengah** dalam beberapa tahun terakhir seperti di Irak, Sudan, Mesir, Libya, dan Suriah sebenarnya tidak perlu terjadi. Konflik dan kekerasan itu terjadi antara lain, menurut Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz (Rektor Darul Ustafa, Tarim, Hadramaut) adalah karena hawa nafsu seseorang sudah terlalu dominan sehingga mengalahkan aturan yang diajarkan Allah. Menurutnya, pendapat pribadi dan pemahaman orang-orang tertentu atas sesuatu dianggap seperti wahyu dari Allah sehingga mereka merasa benar sendiri. Padahal itu semua hanyalah pendapat dan pemahaman pribadi yang belum tentu benar.

Umar bin Hafiz juga pernah menyatakan bahwa konflik dan kekerasan hanya akan membawa mudarat. Karenanya, ia selalu membawa dan menekankan pesan damai ke beberapa negara di Eropa dan Amerika. Ia selalu membawa pesan damai Islam dalam setiap perjalanan ke luar negeri karena Islam memang merupakan agama yang jauh dari kekerasan. Bahkan ia termasuk penandatangan surat terbuka "*A Common Word Between Us and You*" yang pernah ditujukan kepada Paus di Roma. Hal ini merupakan inisiatif dialog damai yang kemudian ditindak-lanjuti dengan berbagai pertemuan antarpemimpin kedua agama. Menurutnya, apabila seorang muslim mempraktekkan petunjuk Allah, maka, ia akan memberi manfaat yang lebih besar, tidak hanya untuk kaum muslim, tetapi juga untuk kaum non-muslim. Umat Islam semestinya dapat hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Ia juga pernah ikut menandatangani Risalah Amman di Yordania yang isinya himbauan bagi umat Islam agar mereka tidak mengkafirkan aliran tertentu¹.

Di hadapan mahasiswa dan pengikutnya, selain menekankan pentingnya ibadah dan dzikir, Umar bin Hafiz juga menegaskan bahwa

¹Tempo, 10-16 Desember 2012, hlm. 180.

umat Islam harus menjadi pionir perdamaian. Namun harus diakui bahwa masih ada konflik antarumat beragama atau aliran seperti pembakaran rumah warga Syi'ah di Madura dan penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah yang mencoreng kerukunan umat beragama di Indonesia. Menurut Umar bin Hafiz, kekerasan terhadap aliran atau agama lain justru mendatangkan mudarat bagi pelakunya. Lebih lanjut ia pernah mensitir hadis Nabi dari Bukhari yang menyatakan bahwa apabila seseorang menuduh muslim lain kafir padahal ia adalah seorang muslim, maka, kekufurannya itu akan kembali kepada si penuduh, dan si penuduhlah yang sebenarnya kafir.²

Insiden penembakan di Sekolah Dasar Sandy Hook Connecticut, **Amerika Serikat**, yang menewaskan 26 orang korban beberapa waktu lalu juga sangat mengejutkan warga dunia, khususnya Amerika Serikat sendiri karena terjadi di negara yang sangat kampiun dalam berdemokrasi, sangat menjunjung tinggi HAM, dan "dikenal" anti terorisme. Pembantaian massal dengan senjata api konon sering terjadi di Amerika Serikat antara lain insiden Columbine, Virginia Tech, Aurora, Jonesboro, dan lain sebagainya.³ Belum reda dan bahkan hanya sepekan setelah tragedi Sandy Hook di Newton terjadi, insiden penembakan oleh warga sipil kembali terjadi di negara tersebut. Kali ini pelaku menyerang sebuah gereja dan rumah di Pennsylvania, Amerika Serikat.⁴

Di **Indonesia** akhir-akhir ini juga disibukkan dengan berbagai informasi terkait konflik dan kekerasan, baik kekerasan alam (gempa bumi), kemanusiaan (terorisme), keuangan (korupsi), dan keagamaan (radikalisme). Para pengamat kemudian sibuk dengan berbagai analisis penyebabnya seperti kesenjangan ekonomi (kemiskinan), kesenjangan pustaka (kebodohan), pengabaian hak-hak asasi manusia, intervensi dan agenda khusus dari luar, pengabaian keterlibatan akar rumput, pengedepanan tokoh-tokoh sentral di pusat kekuasaan dan lain sebagainya. Selama ini, hampir semua pengamat dan orang penting di pusat saja yang dimintai keterangan melalui media massa tetapi kurang memperhatikan peran dan informasi empiris akar rumput (rakyat di bawah) seperti Kepala Desa, Ketua RT, dan Pemuda Desa. Dalam situasi demikian, penulis mencoba mengelaborasi sebuah konsep "Perjuangan Tanpa Kekerasan" dari

²*Ibid.*, hlm.181.

³*Kedaulatan Rakyat*, 17 Desember 2012, hlm. 7.

⁴*Kompas*, 23 Desember 2012, hlm.11.

Soedjatmoko dan Kerja Sama Antaragama dari Kuntowijoyo, yang untuk saat ini tepat sekali untuk dikaji ulang dan diaktualisasikan bersama.

"Perjuangan Tanpa Kekerasan" telah dimulai dan muncul karena Indonesia ketika itu merupakan jajahan Belanda. Bergabung dengan gerakan nasionalis Indonesia merupakan sesuatu yang riskan bagi seorang pelajar. Namun, "Soedjatmoko Kecil" ketika itu ingin sekali bergabung meski ayahnya melarang dan bahkan larangannya cukup menyakitkan karena ia dianggap belum cukup umur. Ia membantah dan bertanya kenapa ayahnya mengajarnya tentang arti penting kebebasan, baik politik maupun batin. Ayahnya memang tidak membolehkannya melakukan sesuatu atas dasar keyakinan yang telah ditanamkan kepadanya dengan mengatakan: "Saya sungguh ingin kau bergabung dalam perjuangan kemerdekaan tetapi hanya setelah kau belajar bagaimana berjuang tanpa kebencian dan kekerasan."

Beberapa tahun yang lalu, tragedi Pembunuhan Olof Palme (Perdana Menteri **Swedia**) tentu tidak hanya membawa duka pribadi melainkan juga suatu kejutan politik yang amat besar. Bahwa tindak kekerasan semacam itu dapat terjadi di Swedia – seperti di negara-negara lain - dalam masyarakat yang teratur dan rasional, merupakan bukti bahwa tidak ada satu sudut pun di dunia ini yang bebas dari kekerasan. Kekerasan telah menjadi tema abadi yang menyakitkan dalam sejarah umat manusia. Rekor kekerasan dalam meraih sasaran-sasarannya pada tahun-tahun itu sungguh menyedihkan. Ini dapat disaksikan dengan intensitas dan peluasan kehancuran di beberapa kawasan seperti Timur Tengah yang hanya menghasilkan jalan buntu setelah segala pembantaian terjadi.

Metode perjuangan alternatif yang telah terbukti terkait melawan kekerasan adalah "Perjuangan Tanpa Kekerasan" (*nonviolence*). "Perjuangan Tanpa Kekerasan" bukan hanya gagasan melainkan taktik atau bahkan strategi. Efektivitasnya sebagai suatu strategi (bagi mereka yang tidak cukup bersenjata) telah berkali-kali ditunjukkan dalam gerakan kemerdekaan Quit-India dan gerakan kulit hitam di Amerika Serikat. Di Philipina, pada awal tahun 1980-an, pemerintahan Marcos yang didukung oleh angkatan bersenjata tidak mampu membendung demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh Corazon Aquino. Revolusi Iran juga merupakan revolusi tanpa kekerasan, suatu revolusi yang berlangsung melalui demonstrasi rakyat, khotbah, kaset, yang semuanya bermuara pada penyusutan dukungan secara besar-besaran terhadap pemerintahan Shah Reza Pahlevi.

Berbeda dari kekuatan kasar, “Perjuangan Tanpa Kekerasan” menaruh sikap hormat terhadap moralitas lawannya. Hal itu tidak tergantung pada kebencian, agresi, dan ketaatan buta untuk memberi motivasi kepada pelaku-pelakunya. “Perjuangan Tanpa Kekerasan” telah mempersatukan moralitas menyangkut pemanfaatan sarana dan pencapaian tujuan. “Perjuangan Tanpa Kekerasan” tidak mematikan akal tetapi membebaskannya dari kelembamannya. Dalam proses tersebut, ia membuka pintu ke arah negosiasi dan membangun sistem “saling percaya” yang lebih mapan.

Kendati demikian, boleh jadi daya tarik praktis - lebih daripada daya tarik moral - “Perjuangan Tanpa Kekerasan” akan menggerakkan upaya mengurangi kekerasan di Dunia Ketiga. “Perjuangan Tanpa Kekerasan” sering digambarkan sebagai senjata kaum lemah. Hal ini benar hanya dalam artian persenjataan komparatif. Menghadang tank hanya dengan tubuh seseorang menuntut keberanian dan membawa risiko yang lebih besar daripada menghadangnya dengan tank lain. “Perjuangan Tanpa Kekerasan” merupakan perjuangan yang tidak gampang, tidak bebas risiko, dan tidak selalu berhasil. Biaya fisik, psikologis, dan moral dari kekerasan sedemikian besarnya sehingga suatu bentuk “perjuangan politik alternatif” harus mendapatkan pertimbangan dan penerapan yang lebih serius.

Mahatma Gandhi memiliki anggapan bahwa tiadanya kepercayaan diri merupakan rintangan paling besar bagi aksi antikekerasan. Gandhi memahami bahwa penciptaan masyarakat tanpa kekerasan dimulai dari pengembalian harga diri bagi seorang individu, dan dari sana melangkah terus menuju suatu pengembangan **ketangguhan** sosial yang lebih luas. Ketangguhan dalam masyarakat merupakan kualitas yang memungkinkan para warga dan berbagai pranata untuk berinteraksi dalam situasi di mana konflik-konflik tidak perlu meledak dalam **kekerasan**. Hal itu beroperasi dalam suatu ruang yang dibentuk oleh segitiga: **perubahan, keadilan, dan tata keteraturan**. Ketangguhan memungkinkan suatu bangsa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan identitas budayanya. Ketangguhan memungkinkan bertambahnya kepercayaan terhadap suatu sistem keadilan, bahkan dengan segala cacat yang melekat pada sistem tersebut. Satu atau serangkaian ejekan terhadapnya tidak akan menimbulkan penolakan terhadap sistem itu secara keseluruhan.

Konsep ketangguhan berbeda dari stabilitas. Stabilitas yang muncul di bawah keadaan yang penuh penindasan berarti pelanggaran

kekerasan. Interaksi ketangguhan pada salah satu dari ketiga dimensi akan menciptakan kekerasan. Perubahan tanpa ketangguhan akan bermuara pada keterasingan dan kehilangan jati diri. Sistem keadilan tanpa ketangguhan akan mengubah berbagai kegagalan manusia yang menjadi katalisator polarisasi. Tata keteraturan tanpa ketangguhan akan bermuara pada penindasan dan gerakan perlawanan yang muncul karenanya.

Upaya membangun ketangguhan sosial bukan hanya tugas negara kendati negara dapat memainkan peranan penting. Tetapi, kualitas ketangguhan terletak pada suatu lingkup budaya masyarakat yang lebih luas. Komitmen bersama terhadap kepentingan umum, pengelolaan konflik tanpa kekerasan, juga tergantung pada tindakan kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga swadaya, kelompok sukarela, partai politik, pranata pendidikan, pranata keagamaan yang melibatkan baik ulama maupun orang-orang awam, media massa, dan sebagainya.

Pranata-pranata sosial yang ada harus menjadi wahana bagi penciptaan dan perwujudan rasa tanggung jawab ini. Tetapi, perlu juga diciptakan bentuk-bentuk institusi baru yang sungguh representatif, baik pada tingkat nasional maupun lokal, guna memupuk kesejahteraan umum. Hampir tidak diragukan lagi bahwa kekerasan akan terus mencemarkan kehidupan sosial politik pada masa mendatang. Pada banyak masyarakat, kesenjangan-kesenjangan yang sedemikian besar, ketidakadilan yang sedemikian buruk, dan mereka yang beruntung sedemikian takut menentang perubahan sehingga kekerasan akan dijadikan jalan keluar terakhir. Ironi yang telah begitu sering diajarkan oleh sejarah kepada masyarakat adalah bahwa penggunaan kekerasan - walaupun dibenarkan - dapat menghancurkan tujuan-tujuan dan cita-cita yang hendak dikejar dan justru menciptakan ketidakadilan yang sama dengan apa yang hendak dihancurkan.

Olof Palme sebenarnya telah mampu memahami secara benar bahwa dalam masa hidupnya, “Perjuangan Tanpa Kekerasan” telah berubah dari suatu mimpi utopis menjadi suatu kebutuhan praktis. Ia terus setia pada perjuangan demi keadilan dan begitu gencar menjalankan perjuangan itu, dan ia tidak pernah menjadi penganjur jalan kekerasan. Penghormatan yang dapat diberikan kepadanya meneruskan perjuangan tersebut dalam sikap yang berdamai dengan masyarakat dan sesama mereka. Sikap berdamai, dengan demikian, dapat menjadi dambaan bagi

mereka yang menghendaki "Perjuangan Tanpa Kekerasan".⁵ Sampai kapan pun dan di mana pun, "Perjuangan Tanpa Kekerasan" harus senantiasa diaktualisasikan secara bersama-sama.

Dalam rangka mengaktualisasikan "Perjuangan Tanpa Kekerasan", umat beragama tentu berada di garis paling depan karena hampir semua agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Dalam konteks ini, "Perjuangan Tanpa Kekerasan" seharusnya dilakukan secara bersama-sama dan melalui kerja sama antarberbagai pihak, khususnya umat beragama. Kerja sama antar agama, menurut Kuntowijoyo, memiliki arti penting dalam peningkatan harmoni antarumat beragama.⁶ Dalam hubungan ini, ia pernah menyatakan bahwa hubungan antarumat beragama perlu mendapatkan nama, isi, dan substansi baru. Selain menimbulkan sikap apologetis, kerukunan dan toleransi juga hanya cocok untuk masyarakat agraris, tetapi tidak sesuai dengan masyarakat industrial. Yang diperlukan sekarang adalah konsep baru hubungan antarumat beragama yang bersifat keluar, dinamis, dan melihat ke depan dengan bersama-sama menghadapi masa depan kemanusiaan. Untuk keperluan tersebut, umat beragama dapat membuat agenda bersama: *agenda nasional* seperti pembangunan, keadilan, kemiskinan, keterbelakangan, dan *agenda global* seperti tantangan modernitas, alienasi, spiritualisme, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Ia akhirnya menyimpulkan perlu adanya perubahan pendekatan, penanganan, dan perumusan dalam hubungan antarumat beragama agar sesuai dengan masyarakat industrial. Perumusan baru itu harus *outward looking*, melihat ke depan, dan dinamis. Untuk itu, ia mengusulkan mengganti nama *kerukunan* atau toleransi dengan *kerja sama* atau *kooperasi*.

Pada tahun-tahun belakangan ini terdapat sejumlah upaya *kerja sama* antaragama menyangkut masalah pembangunan dan perdamaian. Tetapi, upaya-upaya tersebut umumnya diarahkan pada usaha menemukan landasan persamaan bagi kerja sama dalam kondisi dunia yang semakin

⁵Kathleen Newland dan Kemala Chandrakirana, *Transforming Humanity: The Visionary Writings of Soedjatmoko*, (Connecticut: Kumarian Press, 1994), hlm. 168.

⁶Kuntowijoyo, "Dari Kerukunan ke Kerja Sama, Dari Toleransi ke Kooperasi" dalam majalah *Ummat*, no. 14, th. I, 8 Januari 1996; artikel ini kemudian dimuat dalam Andito, *Atas Nama Agama* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 357-63, dan Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 94-100.

mengalami fragmentasi. Di banyak bagian dunia saat ini, dapat diamati semakin besarnya intensitas keagamaan. Hal ini sebagian merupakan reaksi terhadap orientasi yang melulu bersifat materialistik dari ideologi-ideologi besar abad ke-20 yang saling bersaing dan reaksi terhadap harapan dari *developmentalism*.⁷

Selama ini, masyarakat telah didera oleh ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan, perusakan mutu lingkungan hidup, pelangsungan konflik yang penuh kekerasan, dan ancaman pemusnahan yang diakibatkan oleh nuklir.⁸ Kenyataan bahwa segala kemalangan dan kelesuan rohani yang mendalam, yang melanda masyarakat-masyarakat paling makmur dan maju secara teknologis dan industrial telah menunjukkan bahwa kemakmuran material tidak selalu membawa manusia ke keadaan hidup yang memuaskan. Adalah tanggung jawab agama untuk mengartikulasikan kerinduan manusia terhadap perasaan memiliki makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi dan untuk menunjukkan jalan-jalan alternatif ke arah pemenuhan kerinduan tersebut.⁹

Selanjutnya dijelaskan bahwa pemisahan antara agama dan negara merupakan salah satu prinsip demokrasi politik yang berlaku di banyak bagian dunia, khususnya di negara-negara multietnis, yang para pemeluk agamanya harus hidup bersama. Pancasila sesungguhnya merupakan konsensus politik bangsa Indonesia yang sangat pluralistik. Namun, ada juga negara-negara yang didasarkan atas agama. Khusus di dunia Islam, gagasan mengenai negara agama memiliki pendukung yang bersemangat. Munculnya kembali intensitas keagamaan di lingkungan politik, sebagian bersumber pada pemahaman bahwa pemisahan antara agama dan negara telah menyebabkan dibuangnya nilai-nilai keagamaan dari kerja negara, suatu hal yang sering membawa keretakan antara etika dan kebijakan (*ethics*

⁷Dalam tulisannya mengenai "Konsep-konsep Pembangunan Politik", seorang ahli politik Amerika Serikat yang beraliran *developmentalisme*, Lucian W. Pye (1965) menyebutkan 10 konsep mengenai pembangunan politik; lihat, M. Dawam Rahardjo, "Dari Penyunting" dalam, *Reformasi Politik*, 75 Tahun H. Achmad Tirtosudiro (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), hlm. ix.

⁸Th. Soemartana, "Pengantar" dalam Hans Kung and Karl-Josef Kusche, *A Global Ethic, The Declaration of the Parliament of the World's Religions*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Murtafij dengan judul, *Etik Global* (Yogyakarta: Sisyphus bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. xiv.

⁹Soedjatmoko, "Masa Depan", 212-3; lihat juga, Soedjatmoko "Tanggung Jawab Agama terhadap Hari Depan Umat Manusia", *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, no. 2, vol. 2, th. 1989, hlm. 60.

and policy).¹⁰ Dalam periode yang ditandai oleh semakin kuatnya intensitas keagamaan, agama-agama dapat memperbaiki keretakan antara etika dan kebijakan tanpa membuka pintu bagi penyalahgunaan agama demi maksud-maksud politik. Agama dapat melakukan hal itu tanpa memasukkan dogmatisme, sikap fanatik, dan tidak toleran ke dalam sistem sosial yang telah terkoyak-koyak oleh konflik. Agama-agama dapat **bekerjasama** dalam upaya mencapai masyarakat yang bermoral.

Orang perlu memahami bahwa agama merupakan sesuatu yang kompleks. Agama merupakan jalan menuju penyelamatan untuk membawa seorang penganut ke arah kebenaran yang transenden. Dari definisinya sendiri, agama merupakan suatu wahana bagi pandangan-pandangan tentang tata keteraturan dan kelurusan moral. Pada saat yang sama, agama merupakan unsur penting dari identitas kultural suatu bangsa. Dalam banyak masyarakat, agama juga merupakan suatu pranata yang amat kuat, yang erat terkait dengan pranata-pranata sosial, ekonomi, dan politik. Agama dapat merupakan pelopor perubahan dan mobilisasi, atau immobilisasi, dalam masyarakat. Pada matra masyarakat dan orang perorangan, agama merupakan sumber nilai-nilai moral dan etis, suatu pedoman untuk berbuat yang benar. Di antara semua dimensi ini, pentinglah untuk menentukan dimensi-dimensi di mana **kerja sama** antaragama merupakan sesuatu yang diperlukan.

Komunikasi¹¹ antaragama merupakan langkah penting ke arah **kerja sama**. Komunikasi, diskusi, atau dialog antaragama sesungguhnya dapat melicinkan jalan bagi **kerja sama** antaragama. Khursid Ahmad, dalam dialog internasional tentang "Dakwah Islam dan Missi Kristen" pernah menyatakan bahwa,

"Dapatlah kita mulai mengidentifikasi suatu kriteria dasar bahwa **diskusi keagamaan** harus dipisahkan dari **eksploitasi kelemahan** orang, baik secara langsung maupun tidak langsung,

¹⁰Kathleen Newland and Kemala Chandrakirana Soedjatmoko (Editors), *Transforming Humanity, The Visionary Writings of Soedjatmoko* (Connecticut: Kumarian Press, Inc., 1994), hlm. 161.

¹¹A. Mukti Ali menggunakan istilah dialog antaragama; lihat, A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi", makalah disampaikan pada Seminar Indonesia-Belanda tentang Ilmu Perbandingan Agama, diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 16-20 Juli 1990, di Yogyakarta. Komunikasi, dialog, diskusi, dan kerja sama lebih menunjukkan proses yang dinamis, sedangkan kerukunan, kedamaian, dan harmoni lebih menunjukkan produk yang pasif.

atau pun keadaan politik dan sosial yang merugikan. Dan hendaknya kesalahan yang terjadi di masa silam dapat diperbaiki sejauh mungkin untuk melicinkan jalan bagi **kerja sama** efektif di masa depan".¹²

Para penganut masing-masing agama tentu dapat memperdalam pemahamannya sendiri atas hakikat kebenaran transenden dengan cara membuka diri terhadap kepercayaan orang lain. Salah seorang peserta *Future Faith Leaders* (FFL) pernah menyatakan bahwa *to open the door is better than to close*. Pemahaman bahwa terdapat banyak cara untuk melihat dan mengungkapkan kebenaran sering merupakan pijakan awal dari toleransi dan kerendahan hati. Komunikasi¹³ dalam kerangka toleransi timbal-balik memungkinkan spiritualitas berkembang subur sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan dari keragaman adalah untuk merangsang manusia agar "berlomba-lomba dalam kebaikan".¹⁴

Agama dalam aspek-aspeknya yang lebih duniawi merupakan suatu pranata, sumber nilai, dan kekuatan mobilisasi yang telah berkali-kali membawa manusia pada konflik¹⁵ penuh kekerasan sepanjang sejarah hingga saat ini. **Kerja sama** antaragama dalam lingkup ini boleh jadi akan merupakan prasyarat kelangsungan hidup umat manusia. Dapat ditambahkan di sini bahwa kerja sama dalam masing-masing agama, manifestasinya sering bertentangan satu sama lain: antara Gereja yang sudah mapan dan para ahli teologi pembebasan, kaum Sunni dan Syi'ah,¹⁶

¹²Khursid Ahmad dkk., *Dakwah Islam dan Missi Kristen, Sebuah Dialog Internasional* (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 163.

¹³Komunikasi membuat yang sulit menjadi mudah (*communications make the complex simple*). Lihat, John C. Maxwell, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership* (Dallas: Thomas Nelson, 2007), hlm. xiii.

¹⁴*Al-Qur'an*, 5:48.

¹⁵Konflik internal agama sering melahirkan berbagai aliran dalam agama tersebut. Agama dapat menjadi sumber konflik dan sekaligus sumber integrasi; lihat, Achmad Fedayani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Paham dalam Agama Islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 7; lihat, *Laporan Kegiatan 100 Tahun Parlemen Agama-Agama Sedunia dan Kongres Nasional I Agama-Agama di Indonesia*, Yogyakarta, 11-12 Oktober 1993; lihat juga, Allen F. Davis and Harold D. Woodman (Editors), *Conflict and Concensus in Modern American History*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Paul Suroso Hargosewoyo dengan judul, *Konflik dan Konsensus dalam Sejarah Amerika Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).

¹⁶Hamid Enayat, "Shi'ism and Sunnism: Conflict and Concord" in *Modern Islamic Political Thought* (Austin: University of Texas Press, 1982), hlm. 18-51.

kaum mistikus yang merindukan segala sesuatu yang transenden dan para pekerja sosial yang bertekad meluruskan ketidakadilan dalam kehidupan saat ini.

Agama memiliki suatu kepedulian dominan, yang sebagian berada di luar alur sejarah. Pemahaman dan persepsi para pemeluk agama mungkin dapat berubah sejalan dengan bergulirnya waktu¹⁷ tetapi kebenaran itu abadi. Tuhan tidak berubah, apa pun nama atau nama panggilan-Nya.¹⁸ Kendati kebenaran itu abadi, agama juga merupakan gejala sejarah yang terjalin dalam kerusuhan-kerusuhan dan berbagai ketidaksem-purnaan dalam peristiwa kemanusiaan. Agama tidak hanya berada dalam koeksistensi dengan sejarah. Ia menantang dan membentuk sejarah. Agama bahkan sering mencoba mengarahkan sejarah sesuai dengan ajaran-ajarannya sendiri. Agama mengobarkan semangat dan kadang-kadang juga menembakkan peluru dalam upaya meraih kekuasaan sekuler dan kekuasaan terhadap jiwa manusia. Hubungan antara peran ahistoris dan historis agama, antara hal-hal yang transenden dan duniawi dalam kehidupan manusia merupakan suatu keprihatinan yang besar.

Perubahan pesat yang mungkin merupakan ciri utama zaman ini dapat memperbesar ketegangan antara kepedulian agama dengan hal-hal yang transendental dan hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Perubahan yang pesat menyebabkan peningkatan tajam jumlah tantangan terhadap standar-standar tingkah laku moral yang, sejalan dengan perkembangan waktu, telah tumbuh di sekitar agama-agama yang telah mapan dalam konteks historis tertentu. Pengacuan agama mengikuti standar-standar zaman tertentu dapat memperkuat kecenderungan untuk melihat masalah-masalah yang terkait dengan perubahan sosial sebagai masalah moral yang sederhana, atau bahkan untuk melihat perubahan itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak bermoral.

Bahaya konflik dan kekerasan dapat muncul ketika agama kehilangan kemampuannya untuk secara kreatif menanggapi perubahan

¹⁷Nurcholish Madjid "Tinjauan Selintas", 60; Semangat modernisme Islam juga memperhatikan alur sejarah demikian. Tuhan melarang kita untuk memikirkannya karena kita hanya boleh memikirkannya ciptaan-Nya. Perhatikan nama Tuhan dalam pengertian Mu'tazilah.

¹⁸Lihat, Karen Armstrong, *A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 72.

dan mengungkapkan kebenaran transenden-nya yang tidak akan pernah berubah dalam bahasa yang memiliki arti kontemporer. Para penganut agama merasa wajib merenungkan makna perubahan-perubahan yang dialami dan tingkah laku mereka sendiri dalam situasi baru dari perspektif iman mereka. Agama tidak berhasil memenuhi tanggungjawabnya kepada para pemeluknya kalau ia berbicara dengan mereka dalam bahasa yang relevan hanya untuk masa silam. Lebih buruk lagi, agama dapat menjerumuskan para pemeluknya ke dalam kebingungan. Frustrasi dan keputusan yang muncul dapat membawa mereka kepada tradisionalisme reaksioner, kekerasan, atau dapat mengasingkan mereka dari agama mereka sendiri.¹⁹

Kesulitan-kesulitan dalam menangani perubahan-perubahan sosial yang pesat dapat menyebabkan hilangnya pengaruh agama dan menjadikan agama tidak relevan lagi atau menyebabkan kekakuan sosial yang serius, yang menambah ruwet proses transformasi sosial yang demikian kompleks. Kendati demikian, agama memuat di dalam dirinya kewenangan untuk menafsirkan dan menyusun kembali nilai-nilai serta memberikan struktur makna yang dibutuhkan manusia untuk memahami kehidupan mereka. Oleh karena itu, apabila melalui para pemimpinnya, agama mampu mengembangkan pemahaman yang memadai mengenai proses perubahan, agama dapat memainkan peranan penting dalam menyajikan rasa memiliki arah yang bermakna sambil mempertahankan kohesi masyarakatnya.

Tidak satu agama pun dapat memelihara semangat dan kedalamannya bila ia terus menghindar dari tanggung jawab untuk tanggap terhadap perubahan dan mengatasi berbagai persoalan dalam lingkup sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang menyertainya. Terdapat kesadaran yang semakin mendalam bahwa kemiskinan dan ketidakadilan tidak dapat diatasi melulu dengan pemberian derma. Pemahaman yang semakin mendalam mengenai hakikat dan asal-usul kemiskinan dan mengenai struktur yang melanggengkan ketidakadilan, memaksa agama untuk berhadapan langsung dengan keajaiban-keajaiban kekuasaan dan kompleksnya supaya mengubah lembaga-lembaga yang tidak adil.

Gerakan-gerakan sosial yang dirancang untuk melakukan reformasi (transformasi) struktur ekonomi dan politik, betatapun murninya motivasi mereka, pasti dibentuk oleh zamannya. Pada gerakan-gerakan tersebut terukir pribadi para pemimpinnya, lingkungan geografis dan sosial

¹⁹*Ibid.*, hlm. 216.

mereka yang khas. Masing-masing memiliki kontradiksi internal, siklus inspirasi awal, kejayaan, dan kemerosotannya sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan sosial yang permanen.²⁰ Oleh karena itu, agama tidak dapat dan tidak boleh disamakan sepenuhnya dengan gerakan sosial. Walaupun demikian, agama-agama tetap diminta menjadi bagian dari, dan bahkan memelopori, perubahan yang dapat dibenarkan secara moral, atau, malah mendorong perubahan semacam itu. Agama-agama harus mengenali dan memperkuat dorongan-dorongan moral yang menggerakkan perubahan dan tegak berdiri melawan segala sesuatu yang tidak bermoral.²¹ Agama harus dapat melibatkan diri dalam perubahan sosial tanpa mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan sosial atau politik sebagai agama-agama yang baru dan palsu.²²

Adalah tanggung jawab para pemimpin agama untuk secara jelas menanggapi masalah-masalah yang bersifat etis tetapi memiliki muatan politik yang besar.²³ Kendati demikian, kelirulah kalau lembaga keagamaan menobatkan suatu partai politik, kelompok atau individu tertentu sebagai satu-satunya pembawa jawaban yang tepat terhadap persoalan-persoalan politik. **Peranan yang layak bagi agama adalah untuk mengartikulasikan pendirian moral.** Tetapi, di luar itu, agama harus menjadi perantara bagi tuntutan-tuntutan yang sering saling bertentangan antara tata keteraturan umum dan perubahan, dengan mengaitkannya pada kerangka etis yang melampaui lingkup masalah-masalah dan dorongan-dorongan berjangka pendek. Dengan demikian, beberapa agama akan terpaksa meninggalkan peranan tradisional mereka sebagai pemberi legitimasi terhadap otoritas yang sudah mapan, dan sebaliknya, berperanan menjadi penasihat moral dalam proses perubahan yang sulit dan penuh gejala.

Upaya untuk menggabungkan kembali etika dan kebijakan berdasarkan kesadaran baru mengenai makna keagamaan dari sejarah merupakan sesuatu yang mulia dan diperlukan. Namun demikian, hal itu

²⁰Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi. Gerakan-gerakan sosial keagamaan sering patah-tumbuh hilang-berganti.

²¹Ada yang berpendapat bahwa misi agama adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad pernah bersabda: "*Innama bu'ithu li utammima makarim al-akblaq*".

²²Dalam studi agama-agama, biasanya disebut *pseudo religion*.

²³Akhir-akhir ini, sekalipun sulit dibuktikan, sering muncul "tradisi membungkus" sebuah kepentingan yang dilakukan banyak kalangan.

juga penuh bahaya dogmatisme, sikap tidak toleran, dan absolutisme. Penerapan keyakinan keagamaan dalam lingkup duniawi dapat membawa fanatisme yang amat keji.²⁴ Guna menghindari bahaya demikian, proses penalaran moral harus diartikulasikan dengan jelas dan penghargaan yang mendalam harus dipupuk terhadap batas-batas yang memisahkan keputusan keagamaan dari keputusan politik.

Keputusan politik sering diartikan sebagai keputusan moral yang dibawa selangkah lebih jauh, tetapi arah-arah yang mungkin diambil oleh langkah yang lebih jauh itu hampir tidak terbatas. Amat penting bagi mereka yang mencoba berpikir dan bertindak secara moral untuk memahami bahwa terdapat banyak cara yang berbeda-beda dan sah untuk menerjemahkan keputusan moral ke dalam tindakan politik. Fanatisme dan kepicikan dimulai pada saat hanya satu jalan yang dianggap memiliki legitimasi moral. Para pemimpin agama memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar energi dan inspirasi kaum beriman tidak mengalir ke jalur-jalur yang sempit dan gelap.

Sebagian besar kaum beragama akan sepakat mengambil suatu pendirian moral melawan kemiskinan. Sebagian masyarakat yakin bahwa sistem kapitalis menimbulkan kemiskinan. Bagi orang semacam itu, melawan kemiskinan berarti melawan Kapitalisme. Melawan kemiskinan merupakan suatu *keputusan moral*, dan melawan Kapitalisme adalah *keputusan politik* yang muncul dari *keputusan moral*. Dari *keputusan moral* yang sama, orang lain dapat berakhir pada *keputusan politik* yang berlawanan. Pada tataran politik, kedua orang itu dapat saling bertentangan. Tetapi, kelirulah kalau mereka saling memberi cap pihak lain sebagai tidak bermoral, dan dengan demikian, menghancurkan kemungkinan bagi dialog dan *kerja sama* di antara mereka".

Kemungkinan *kerja sama* antaragama tergantung pada *kemampuan* untuk mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip moral yang mendasar, dan pada *kesiapan* menghormati cara masing-masing umat beriman dalam menjalankan upayanya untuk menerjemahkan keputusan moralnya ke dalam kenyataan sosial. Idealnya adalah bahwa mereka sepakat untuk berkarya guna melawan kemiskinan dan ketidakadilan, berkarya demi perdamaian dan pemeliharaan bumi secara bertanggungjawab melalui saluran masing-masing, secara bersama-sama, atau sendiri-sendiri.

²⁴Merasa paling benar.

Di luar komitmennya terhadap perubahan-perubahan tertentu, tidak satu agama pun yang dapat lari dari kewajiban untuk berusaha sebanyak mungkin mengurangi biaya manusiawi (*human cost*) dari perubahan. Hal ini berarti penolakan terhadap kekerasan dan penekanan pada toleransi, sikap, dan tata hidup yang beradab, pemrosesan yang sesuai dengan hukum, prosedur-prosedur demokratis, norma hukum (*rule of law*) dan hak-hak asasi manusia. Agama harus menyajikan struktur makna yang jangkauannya melampaui politik. Agama harus mengajarkan cara berpikir dan jiwa yang penuh kerendahan hati, yang amat diperlukan di dalam zaman yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang pesat dan tidak terduga.

Kerja sama antaragama memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali visi yang lelap tertidur mengenai kesamaan hakiki antarumat manusia. Landasan persamaan moral antaragama cukup luas untuk memungkinkan terbentuknya tantangan bersama melawan persoalan-persoalan besar yang mengancam umat manusia dan segala ciptaan Tuhan di bumi ini. Landasan persamaan antaragama barangkali masih jauh lebih besar lagi kalau saja manusia memiliki kemampuan dan inspirasi untuk memahaminya. Masih diperlukan rasa simpati pada orang lain dan rasa kemanusiaan dalam dunia yang sesak, kompetitif, dan relatif terbatas. **Barbara Ward** pernah berkata: "**Kita harus belajar mencintai satu sama lain, atau kita semua akan lenyap**".



Apakah agama benar-benar telah menjadi sumber rahmat bagi terciptanya perdamaian dalam kehidupan umat manusia sebagaimana diyakini oleh para pemeluknya? Atau sebaliknya, agama justru sebagai pemicu kekerasan yang seringkali menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerugian sebagaimana sejarah sering membuktikannya?

Diskusi tentang agama selalu menjadi fokus bersama, tidak mengenal ruang dan waktu, kapan pun dan di manapun. Hal itu terjadi karena agama, dengan berbagai cara telah dilakukan untuk meninggalkannya atau minimal menjadikannya wilayah privat, namun ia tidak pernah terpisah atau lepas secara penuh dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik umat manusia. Hal itu mudah dipahami karena manusia secara bersamaan adalah makhluk religius, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya.

Oleh karenanya kedua pertanyaan bipolar di atas penting untuk dianalisis secara jernih dan dibicarakan tanpa apologi apapun. Bukan saja karena memang pada kenyataannya agama seringkali menjadi faktor destruktif dalam kehidupan manusia, namun juga karena kita meyakini bahwa agama adalah ideal dan baik. Sehingga perlu dipetakan semacam distingsi antara agama ideal –atau agama damai (*peace religion*) dalam tema antologi ini, dengan agama yang telah “dipolitisasi” oleh para pemeluknya, bahkan oleh para pemuka/figur/tokoh agama sendiri –para elit keagamaan. Di sini agama kemudian menjadi identitas diri dan kelompok. Orang atau kelompok tadi kemudian menganggap dirinya paling benar –minimal lebih benar- dalam memahami dan menjalankan agama dan siap melakukan bahkan pengorbanan harta dan nyawa untuk mempertahankan identitas dalam bentuk pemahaman tadi yang telah diyakini sedemikian rupa sebagai “agama”.

Diterbitkan Oleh

Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin
Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Bekerjasama dengan Penerbit Belukar

ISBN 979-3494-56-5



9 789793 494562